

**ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG  
NOMOR 15/PDT.G/2012/PA.SLP TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI  
DITINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG PERKAWINAN**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - tugas dan Syarat - syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



**DISUSUN OLEH :**

**KHOIRI**  
**NIM. 10921005487**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
JURUSAN AHWAL AL – SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

Salah satu produk hukum yang digunakan sebagai bahan acuan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara adalah undang – undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang - undang nomor 01 tahu 1974 tersebut menganut asas monogami. Artinya isbat nikah yang terdapat pada penjelasan pasal 49 Undang – undang Peradilan Agama adalah isbat nikah monogami, agar tidak bertentangan dengan undang - undang perkawinan itu sendiri.

Sehingga disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/VI/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan untuk menghindari penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedural, Pengadilan Agama harus selektif dan berhati hati dalam menangani permohonan isbat nikah (Penetapan Nikah).

Tetapi bagaimana ketika kita kaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami yang mana pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan permohonan isbat nikah Poligami.

Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan apa dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan isbat nikah poligami dan bagaimana analisa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang sebagai sumber pertama baik berupa wawancara, salinan putusan dan berita acara persidangan.

Adapun hasil atau temuan dari penelitian ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Selatpanjang ditinjau menurut Undang – undang Perkawinan ?. Penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami apabila ditinjau menurut undang – undang kurang tepat, karena undang – undang melarang tentang adanya isbat nikah poligami. Tetapi dari sudut panjang ijtihad putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami itu benar karena Hakim mempunyai hak untuk berijtihad ketika memutuskan suatu perkara.

Kemudian alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang menggabungkan antara isbat nikah dan Poligami. Isbat Nikah merupakan kompetensi Pengadilan Agama serta syarat – syarat Poligami telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang tidak ada salahnya isbat nikah poligami ini dikabulkan.

Sub analisis Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang adalah pada intinya isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selatpanjang adalah untuk menghindarkan dari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diantaranya yang berbunyi:

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat" .

## ***UNTUK SAHABATKU***

*Sahabat,*

*Sikap tawadhu' yang engkau miliki*

*Sikap Wara' yang kau pelihara*

*Sikap Zuhud yang kau padu*

*Penyejuk hati setiap insan*

*Pertahankanlah!*

*Sahabatku,*

*Perjuanganmu untuk Islam*

*Bak obor dikegelapan*

*Engkau bagaikan Khalifah Abu Bakar,*

*Sahabat Nabi yang bijaksana.*

*Tetapi, apakah engkau telah seperti Umar,*

*Menelusuri lorong - lorong jalan,*

*Sehingga menemukan rakyat yang kelaparan?*

*Sahabatku,*

*Di setiap langkah juangmu*

*Berkat do'a ayah bunda yang melahirkanmu*

*Dengan penuh rintihan pilu,*

*Bersimbah peluh beruntai tetesan tirta mutiara.*

*Tatkala kau terpana akan dunia yang penuh coba,*

*Kau mengis tanda derita.*

*Allahu Akbar, Azan menggema. Qomat berkumandang,*

*Kalimat pertama yang engkau dengar.*

*Wanita mulia bernada dalam tangisannya:*

*Anakku, jadilah setiap langkahmu,*

*Langkah juang dalam Islam.*

*Anakku, jadilah setiap nafasmu,*

*Nafas tasbih memuji Tuhan.*

*Cintaku sepenuh kalbu,*

*Sayangku tak pernah beku,*

*Kasihku bab beledu.*

*Ingatkah kau padaku?.*

*Sahabatku,*

*Wanita pendampingmu,*

*Yang membuatmu bersujud syahdu*

*di hadapan Ilahi yang selalu rindu*

*akan sedu sedanmu,*

*Janagnkau lupakan!*

***Neng Djubaidah, SH***

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ARIS BINTANIA, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

Pekanbaru, 15 Januari 2013

Nomor :	Nota Dinas	Kepada Yth.
Lam :	-	Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Hal :	Pengajuan Skripsi	Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim
	Sdr. <b>Khoiri</b>	Di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi atas nama **Khoiri** yang berjudul "**Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan**" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu yang dekat, saudara **Khoiri** dapat dipanggil dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian harapan kami, mudah - mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam  
Dosen Pembimbing

**Aris Bintania, M.Ag**  
NIP: 197507232000031001

**KATA PENGANTAR**

حمد لله الذي جعلنا من الناصحين . وافهمنا من علوم العلماء الراسخين .  
والصلاة والسلام علي من نسخ دينه الكفرة والصلحين . وعلي اله واصحابه  
ين كانوا يتمسك شريعته صالحين .

Rasa syukur yang sedalam dalamnya kupanjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Swt yang senantiasa melindungi dan menjagaku serta keluargaku dari hal-hal yang mungkin membahayakan diriku dan keluargaku. Sujud syukur yang sedalam-dalamnya, karena rasa senang bercampurkan bahagia serta tetesan air mata keharuan dan kebahagiaan jatuh tidak terasa. Tetesan keharuan ketika masa - masa kuliah banyak tantangan dan hambatan yang penulis rasakan, sampai - sampai tersentak didalam hati untuk berhenti. Dan tetesan kebahagiaan ketika penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang pada awalnya tampak mudah untuk dikerjakan, tetapi sebenarnya merupakan tugas yang sangat berat karena harus berhadapan dengan rasa malas yang kadang - kadang muncul secara tiba - tiba dan sulit untuk menghilangkannya. Serta tetesan kebahagiaan ketika melihat kedua orang tua tersenyum dan menangis bahagia ketika anak pertamanya bisa diwisuda dan memperoleh gelar Sarjana yang selama ini Ayahanda dan Ibunda harap - harapkan, ternyata impian beliau tercapai.

Shalawat dan salam penulis haturkan dan persembahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi besar Muhammad Saw yang telah menjalankan peran kerasulannya untuk membahwa umat manusia kepada perubahan yang dahsyat, sehingga keabadian namanya tercium harum sepanjang masa dan tidak akan

pernah hilang dikekang masa. Mudah - mudahan syafaat beliau akan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita sebagai umatnya pada yaumul Mahsyar nanti.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam penulisan skripsi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian skripsi. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku dan adik - adikku, Ayahanda Darmuji dan Ibunda Napsiah (Wiji Lestari) serta Adinda M. Mukhlisin, Adinda Duratun Nafisah dan Adinda Neli Purnawati yang sangat penulis sayangi dan cintai semuanya, yang selalu memberikan semangat dan dorongan setiap saat dan setiap waktu tanpa ada mendengar sedikitpun kata menyerah dan rasa lelah.
2. Seluruh keluarga besar penulis baik dari pihak Ayahanda maupun Ibunda tanpa terkecuali, terima kasih semuanya yang telah memberi semangat kepada cucu, keponakan, adik, abang maupun sepupumu ini sehingga gelar Sarjana dapat didapatkan atau dicapai.
3. Yang terhormat dan yang Penulis muliakan bapak Prof. DR. M. Nazir Karim, MA (Selaku Rektor), bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA (Selaku pembantu Rektor I), bapak Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA. M.Pd (Selaku Pembantu Rektor II) dan bapak Drs. Promadi, M.Pd. P.hd (Selaku Pembantu Rektor III) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Yang terhormat bapak DR.H. Akbarizan, MA. M.Pd (Selaku Dekan), Ibu DR. Hertina, M.Pd (Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Kastulani, SH. MH (Selaku Pembantu Dekan II), bapak Drs. Ahmada Darbi B, M.Ag (Selaku Pembantu Dekan III), Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Yang terhormat bapak Aris Bintania, M.Ag, sebagai dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah mengarahkan serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat bapak Prof. DR. Akhmad Mujahiddin, MA selaku penasehat Akademik Penulis yang selalu memerikan arahan dalam masalah perkuliahan.
7. Yang terhormat bapak Drs.Yusran Sabili MA. sebagai ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah atau jurusan penulis yang selalu membimbing kami dalam belajar.
8. Yang terhormat bapak kepala Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
9. Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang, Para Majelis Hakim dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Selatpanjang, yang telah menerima penulis dengan baik pada saat penelitian.
10. Rekan - rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan secara materil maupun moril terutama lokal AH I (satu).

11. Seluruh Jama'ah Masjid Baitul Makmur (Perumahan Cikara Utama Asri) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru tempat tinggal penulis selama kuliah yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Serta pihak - pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu yang ikut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.
13. Hanya Allah Swt yang akan membalas semua kebaikan - kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 15 Januari 2013  
Penulis

**KHOIRI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK-----	i
HALAMAN PERSEMBAHAN-----	iii
KATA PENGANTAR-----	v
DAFTAR ISI-----	ix

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Batasan Masalah-----	5
C. Rumusan Masalah-----	6
D. Tujuan Penelitian-----	6
E. Kegunaan Peneliti dan Manfaat Penelitian-----	6
F. Metodologi Penelitian-----	8
G. Sistematika Penulisan-----	11

### **BAB II    SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

A. Sejarah berdirinya-----	13
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selatpanjang-----	15
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang---	15
D. Yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang-----	17
E. Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Selatpanjang-----	29
F. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Selatpanjang----	22

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH DAN POLIGAMI**

A. Pengertian Isbat Nikah dan Poligami-----	24
B. Dasar Hukum Isbat Nikah dan Poligami-----	27
C. Sebab - Sebab Isbat Nikah-----	37
D. Ketentuan Pidana-----	37
E. Pedoman Khusus Izin Poligami di Pengadilan Agama-----	48
F. Tata Cara Pemeriksaan Isbat nikah dan Izin Poligami-----	41

### **BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG NOMOR 15/PDT.G/2012/PA.SLP TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI**

A. Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan---	49
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Mengabulkan Isbat Nikah Poligami-----	55
C. Analisa Putusa Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami-----	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan-----	74
B. Kritik dan Saran-----	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Agama Selatpanjang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 tentang pembentukan kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di daerah Provinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara <sup>1</sup>.

Salah satu lembaga menegakkan hukum dalam mencapai keadilan dan menjamin kepastian hukum adalah badan - badan Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang - undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masing - masing Peradilan tersebut mempunyai lingkup wewenang yang menerima dan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu <sup>2</sup>.

Salah satu kompetensi Pengadilan Agama adalah kompetensi Absolut (Memaksa), yaitu hal – hal yang telah ditentukan menjadi kekuasaan atau wewenang atau yurisdiksi suatu lingkungan peradilan Agama, menjadi wewenang mutlak bagi lingkungan peradilan Agama yang bersangkutan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya perkara <sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun , *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Selatpanjang*, (Selatpanjang: Pengadilan Agama Selatpanjang, 2010), h., 1

<sup>2</sup> Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang - undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Terbitan Jambatan, 1985), h., 39

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), h., 29

Isbat nikah dan Izin Poligami merupakan salah satu wewenang atau kompetensi Absolut (memaksa) dari Pengadilan Agama. Isbat atau penetapan berasal dari bahasa Arab berasal dari wazan ( يثبت - ) artinya tetap atau ( يثبت - ) menetapkan<sup>4</sup>. Isbat atau penetapan menurut undang - undang Peradilan Agama adalah keputusan pengadilan atau perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon<sup>5</sup>.

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki - laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak - hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki - laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan - ketentuan syari'at Islam<sup>6</sup>.

Sedangkan Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki - laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki - laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang<sup>7</sup>.

Salah satu produk hukum yang digunakan sebagai bahan acuan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara adalah undang - undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h., 80

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badilag, 2010), h. 544

<sup>6</sup> Moh. Rif' ai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), h., 483

<sup>7</sup> Abdul Manan Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.,

undang - undang nomor 01 tahun 1974 tersebut menganut asas monogami (satu istri atau satu suami), sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya walaupun Pengadilan Agama boleh mengisbatkan nikah, sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang – undang Peradilan Agama, hanya boleh atau terbatas mengisbatkan pernikahan satu istri atau satu suami (asas monogami) agar tidak bertentangan dengan undang - undang perkawinan itu sendiri.

Sehingga disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/VI/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan untuk menghindari penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedural, Pengadilan Agama harus selektif dan berhati - hati dalam menangani permohonan isbat nikah (Penetapan nikah) <sup>8</sup>.

Sehingga pada Keputusan Mahkamah Agung ini juga diatur hukum acara khusus tentang izin poligami di Pengadilan Agama, supaya tidak bertolak belakang dengan undang - undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami.

Dari peraturan perundang - undangan atau Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada, sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengisbatkan Nikah dengan satu istri sesuai dengan asas monogami yang dianut oleh undang - undang perkawinan itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2010), h., 148

Apabila kita melihat dari kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang isbat nikah (isbat poligami). Pemohon merupakan salah seorang anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berusia 55 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan Termohon I (istri kedua) Pemohon berusia 36 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti. untuk Termohon II (istri pertama) Pemohon berusia 58 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemohon (Suami) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mengisbatkan nikahnya dengan Termohon I (istri kedua) dilakukan pada tanggal 15 Desember tahun 1998 di Desa Sialang Pasung (Kabupaten Kepulauan Meranti), dikarenakan untuk mengurus keperluan - keperluan tertentu seperti untuk membuat Akte Kelahiran anak - anaknya dan kartu keluarga (KK), dikarenakan nikahnya dilakukan dibawah tangan (nikah Sirri) maka tidak mempunyai kutipan akte nikah.

Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan permohonan pemohon dengan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp. Sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Selatpanjang bahwa " Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan undang - undang yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini, MEGADILI (1) Mengabulkan permohonan pemohon (2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998 di Kabupaten



Kepulauan Meranti " . Artinya Pengadilan Agama Selatpanjang sama dengan melegalkan (mengesahkan) nikah dibawah tangan atau nikah Sirri. Sedangkan bagi Pemohon telah melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 56 tentang izin poligami dari pengadilan dan pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang pencatatan perkawinan maupun peraturan dan perundang - undang yang lain. Bahkan menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 bisa didenda sebanyak Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagaimana putusan ini apabila ditinjau menurut undang - undang Perkawinan yaitu undang - undang nomor 01 tahun 1974 yang menganut asas monogami. Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam tentang Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp ditinjau menurut undang - undang perkawinan, maka penulis tuangkan atau uraikan ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul : " **Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/ Pdt.G/2012 /PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan** ".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul dalam penelitian ini, begitu juga untuk mempermudah memahami serta menghindari penafsiran yang berbeda - beda tentang penelitian ini, maka penulis perlu membatasi terhadap judul ini. Adapun judul penelitian ini berkaitan dengan analisa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012 /PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang perkawinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka peneliti merumuskan 2 (dua) masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan ?.
2. Apa dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan isbat nikah poligami ?.
3. Bagaimana Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami ?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ( tugas akhir kuliah) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan isbat nikah poligami.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami.

### **E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara Peradilan Agama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan.
3. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ini.
4. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Selain ilmu yang diperoleh penulis selama duduk di dalam bangku perkuliahan dan juga untuk menyelesaikan tugas penelitian akhir kuliah sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta cakrawala dalam berfikir penulis secara pribadi, terutama dalam melakukan dan mengadakan karya tulis ilmiah dan umumnya para pembaca.
7. Memberikan jawaban praktis mengenai Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Selatpanjang. Disitu peneliti melihat ada suatu permasalahan dan tertarik untuk meneliti yang bersangkutan atau berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012 /PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan.

### **2. Populasi dan sampel**

Dikarenakan penulis hanya meneliti satu putusan saja, yaitu putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012 /PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - undang Perkawinan, maka Penulis tidak menggunakan sampel.

### **3. Subjek Dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang dan Panitera atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara tersebut.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami.

### **4. Sumber Data**

Secara garis besar besar sumber data dalam penulisan ini ada 2 (dua) macam:

a. Data Primer

Yang dimaksud data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner <sup>9</sup>. Adapun sumber data primernya adalah berita acara persidangan, salinan putusan dan hasil wawancara langsung dengan Supriyanto (Sebagai Hakim Ketua Majelis).

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Metode wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan atau tulisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan fisik <sup>10</sup>.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan - catatan, putusan pengadilan, transkrip, buku - buku, surat

---

<sup>9</sup> Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Peyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h., 6

<sup>10</sup> Jonanthan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h., 34

kabar, majalah - majalah, artikel - artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya <sup>11</sup>.

## **6. Analisa Data**

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode Kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

## **7. Metode Penulisan**

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- **Deduktif**

Dengan metode ini, penulis memaparkan data - data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

- **Induktif**

Dengan metode ini penulis memaparkan data - data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

- **Deskriptif**

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data - data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan .

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), h., 236.

## **8. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**      Sekilas tentang Pengadilan Agama Selatpanjang yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas dan fungsi, yurisdiksi, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Selatpanjang dan struktur kepengurusan Pengadilan Agama Selatpanjang.

**BAB III**    Tinjauan umum tentang isbat nikah dan poligami yang terdiri dari pengertian isbat nikah dan poligami, dasar hukum isbat nikah dan poligami, orang - orang yang boleh mengajukan isbat nikah , sebab - sebab isbat nikah, ketentuan pidana, pedoman khusus izin poligami di Pengadilan Agama, tata cara pemeriksaan isbat nikah dan izin poligami di Pengadilan Agama.

**BAB IV**    Analisa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang – undang perkawinan yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami tersebut ditinjau menurut undang - undang Perkawinan, dasar hukum atau

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang  
mengabulkan isbat nikah poligami dan analisa putusan Pengadilan  
Agama Selatpanjang tentang isbat nikah poligami.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran - saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA**

### **SELATPANJANG**

#### **A. Sejarah Berdirinya**

Pengadilan Agama Selatpanjang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 Tentang Pembentukan Kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di dalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Selatpanjang berlokasi di jalan Amalia Selatpanjang (berstatus tempat sidang atau sidang keliling) kemudian pada tahun 1972 resmi pembentukan kantor Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972, kantor Pengadilan Agama Selatpanjang mengontrak di jalan Diponegoro Selatpanjang. Tahun 1980 kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Selatpanjang pindah kelokasi Balai Latihan Gulat Selatpanjang. Dikanan kiri gedung ini dimukimi penduduk keturunan cina, ukuran kantor 5 x 7 meter dengan lantai tidak rata<sup>1</sup>.

Kemudian pada tahun 1982 Depertemen Agama Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dan terealisasi pada tahun itu juga serta dibangun kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang bertempat di jalan Yos Sudarso diatas sebidang tanah dengan ukuran 20 X 40 M dengan kondisi tanah rawa - rawa, sampai sekarang

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Selatpanjang, diambil pada tanggal 26 Nopember 2012.

telah mengalami penambahan ruang sidang dan perbaikan serta rehap ringan, baik dengan anggaran Departemen Agama maupun dengan anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, namun karena konstruksi bangunan kantor terbuat dari kayu dan berdiri diatas rawa - rawa, sehingga pelayanan prima bagi pencari keadilan kurang dapat terwujud, karena dengan kondisi kantor yang terlalu kecil dan lapangan parkir yang tidak ada disamping itu berkas - berkas yang ada selalu dihinggapai atau dimakan rayap, maka mau tidak mau harus diupayakan untuk membangun sebuah kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang representatif dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam tahun 2007, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam DIPA Tahun 2007 Pengadilan Agama Selatpanjang termuat anggaran untuk mengawali pembangunan sebuah kantor baru Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai prototipe yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun karena anggaran yang tersedia tidak memadai untuk sampai ke finbising, maka pembangunan kantor baru tersebut dilaksanakan secara bertahap sebanyak tiga tahap dan finising pada tahun 2009.

Sejak tahun 2010 operasional Pengadilan Agama Selatpanjang telah beroperasi dengan nyaman di Gedung baru kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang terletak di jalan Dorak <sup>2</sup>.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Selatpanjang hingga saat ini secara berturut - turut telah dipercayakan kepada :

1. Drs. Bukhori Ras (1976 - 1978)

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

2. Drs. H. Abasa Hasan (1978 - 1988)
3. Drs. Taslim Prawira (1988 - 1998)
4. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH (1998 - 2003)
5. Drs. H. Endang Tamami (2003 - 2007)
6. Drs. H. M. Nasrul K, SH., MH (2007 - 2010)
7. Dra. Hj. Husni Rasyid, MH (2010 - 2011)
8. Drs. M. Adnan Yus, SH (2011 - Sekarang) <sup>3</sup>.

#### **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selatpanjang**

Adapun visi dari Pengadilan Agama Selatpanjang adalah "Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT ".

Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Selatpanjang adalah Pengadilan Agama Selatpanjang adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara - perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan <sup>4</sup>.

#### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang**

Pengadilan Agama Selatpanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang – undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang - orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah <sup>5</sup>.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara - perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

---

<sup>5</sup> Pustaka Yustisia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Buku Kita, 2009), h., 52

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan).
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain – lain
7. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas - luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan<sup>6</sup>.

#### **D. Yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang**

Pengadilan Agama Selatpanjang sebelum tahun 2008 masih berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan setelah adanya pemekaran daerah maka

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Selatpanjang, *Op.Cit.*

sekarang Pengadilan Agama Selatpanjang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan wilayah hukum terdiri dari 7 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
3. Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
4. Kecamatan Rangsang.
5. Kecamatan Rangsang Barat .
6. Kecamatan Merbau.
7. Kecamatan Kepulauan Merbau.



Gambar: Peta Kabupaten Kepulauan Meranti (Yuridiksi Pengadilan Agama Selatpanjang)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid.

#### **E. Hakim Dan Pegawai Pengadilan Agama Selatpanjang**

Adapun nama – nama Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Nama : Drs. M. Adnan Yus, SH  
Tempat/ tanggal lahir : Bagan Siapi - api, 07 Agustus 1955  
NIP : 195508071983031008  
Jabatan : Ketua Pengadila Agama Selatpanjang
2. Nama : Drs. Samsul Amri, SH., MH  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Tanang, 31 Desember 1967  
NIP : 196712311993031043  
Jabatan : Waka Pengadila Agama Selatpanjang
3. Nama : H. M. Arifin, SH  
Tempat/tanggal lahir : Selatpanjang, 18 Agustus, 1959  
NIP : 195908181982031006  
Jabatan : Hakim
4. Nama : Supriyanto, S.Ag., M.Si  
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 07 Juni 1974  
NIP : 197406071998031002  
Jabatan : Hakim
5. Nama : Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 26 Juni 1973  
NIP : 197306261998031001  
Jabatan : Hakim

6. Nama : Abdul Aziz Mahmud Idris, S.HI  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 20 September 1979  
NIP : 197906202007041001  
Jabatan : Hakim
7. Nama : Marlina, S.HI  
Tempat/tanggal lahir : Pagar Alam, 10 Januari 1979  
NIP : 197801102009042003  
Jabatan : Hakim
8. Nama : Drs. M. Ja'far  
Tempat/tanggal lahir : Paccing, 31 Desember 1956  
NIP : 195612311991031009  
Jabatan : Panitera atau Sekertaris
9. Nama : Nurambiya, SH  
Tempat/tanggal lahir : Air Tiris, 20 April 1961  
NIP : 196104201992032001  
Jabatan : Wakil Panitera
10. Nama : Drs. Djauhar Masuku  
Tempat/tanggal lahir : Sanana Ternate, 08 Juni 1956  
NIP : 195606081992031001  
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
11. Nama : M. Azmi, S.Ag  
Tempat/tanggal lahir : Bangkinang, 22 Nopember 1971  
NIP : 197111221998031001



- Jabatan : Panitera Muda Gugatan
12. Nama : Nurqomariyah, SH
- Tempat/tanggal lahir : Selatpanjang, 23 Oktober 1980
- NIP : 198010232000122001
- Jabatan : Panitera Muda Hukum
13. Nama : Dwi Nofmiyani, S.Ag
- Tempat/tanggal lahir : Tameran, 13 Nopember 1976
- NIP : 197611132002122003
- Jabatan : Panitera Pengganti
14. Nama : Wira Utami, S.HI
- Tempat/tanggal lahir : Tarempa, 26 Juni 1983
- NIP : 198306262006041011
- Jabatan : Juru Sita Pengganti
15. Nama : Hermawandi, S.HI
- Tempat/tanggal lahir : Merempan Siak, 25 Desember 1985
- NIP : 198512252011101012
- Jabatan : Staf Panitera Muda Hukum
16. Nama : Muhammad Nawawi, S.Ag
- Tempat/tanggal lahir : Pulau Kecil, 08 Desember 1974
- NIP : 197412082001121001
- Jabatan : Wakil Sekretaris
17. Nama : Sestri Lestari, SH
- Tempat/tanggal lahir : Alah Air, 16 September 1979

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| NIP     | : 197909162003122004        |
| Jabatan | : Kepala Urusan Kepegawaian |
18. Nama : Hendra Saputra, A.Md
- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Dumai, 28 Juni 1979 |
| NIP                  | : 197906282006041003  |
| Jabatan              | : Kepala Urusan Umum  |
19. Nama : Hera Venriko,SE
- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Duri, 21 Juni 1979     |
| NIP                  | : 197906212009041002     |
| Jabatan              | : Kepala Urusan Keuangan |
20. Nama : Anda Lia Roza,SE
- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tempat/tanggal lahir | : Pekanbaru, 22 Juni 1984  |
| NIP                  | : 1984062220091222007      |
| Jabatan              | : Staf Umum <sup>8</sup> . |

## **1. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Selatpanjang**

Untuk struktur kepengurusan Pengadilan Agama Selatpanjang, penulis ambil dari papan nama struktur kepengurusan Pengadilan Agama yang ada di Pengadilan Agama Selatpanjang yang penulis ambil tepatnya pada tanggal 26 Nopember 2012.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH**

### **DAN POLIGAMI**

#### **A. Pengertian Isbat Nikah dan Poligami**

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat berasal dari bahasa Arab ( **الاثبات** ) artinya penetapan, pengukuhan atau pengiyaan (isbat). Atau ( **ثابت - ثباتا - وثبوتا** ) artinya tetap, kekal, abadi atau stabil. Atau dengan kata lain yaitu ( **يثبت - يثبت** ) artinya menetapkan, menguatkan dan mengukuhkan <sup>1</sup>.

Isbat atau Penetapan menurut Undang - undang Peradilan Agama adalah keputusan pengadilan atau perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon <sup>2</sup>. Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa isbat artinya penyungguhan, penetapan atau penentuan. Meng - isbatkan yaitu berupa penyungguhan, menentukan atau menetapkan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu. Peng - isbatan yaitu proses, cara atau perbuatan mengisbatkan. Jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa yang dimaksud dengan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan atau pernikahan <sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al - Munawir*, (Surabaya: Progresif, 1984), h., 145

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), h. 544

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), h., 549

Menurut Sutomo merupakan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya penetapan atau pengesahan nikah. Pengesahan atau penetapan nikah yang dilakukan sebelum berlakunya undang - undang Nomor 01 Tahun 1974 sesuai dengan pasal 49 angka atau poin (22) undang - undang Peradilan Agama undang - undang Nomor 07 tahun 1989 kemudian diubah dengan undang - undang Nomor 03 tahun 2006 dan diubah atau amandemen lagi dengan undang - undang Nomor 50 Tahun 2009. Atau dengan definisi lain isbat nikah adalah pengesahan atau penetapan nikah karena, adanya perkawinan dalam rangka perceraian, hilangnya akte nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang - undang perkawinan yaitu undang - undang nomor 01 tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) <sup>4</sup>.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nilla Fitria disebutkan isbat adalah suatu upaya hukum untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang telah terjadi dengan mengajukan bukti - bukti tertulis maupun saksi - saksi yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan suatu ketetapan atau pengesahan nikah sebagai alat bukti dikemudian hari <sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Sutomo (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru), *Wawancara*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Tanggal 02 September 2012.

<sup>5</sup> Nilla Fitria, *Skripsi Penyelesaian Perceraian Nikah Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: IAIN SUSQO Pekanbaru, 2003), h., 45

Sedangkan Nikah atau Perkawinan dalam Al - Qur'an dan Hadits disebut dengan Nikah ( نكاح ) dan zawaj ( زواج )<sup>6</sup>. Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu " hubungan jenis kelamin " ( الوطاء ), " bergabung " ( الضم ) " mengumpulkan " ( لجمع ) dan juga " akad " ( العقد )<sup>7</sup>.

Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah "Akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan<sup>8</sup>.

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah Al - Zuhaili yaitu perkawinan adalah "Akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki - laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya"<sup>9</sup>.

Sedangkan kata - kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki - laki mempunyai lebih

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet-III., h., 35 - 36

<sup>7</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 42 - 43

<sup>8</sup> Muhammad. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. III, h., 11

<sup>9</sup> Wahbah al - Zuhaili, *Al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dara al - Fikr, tt), Jilid VII, h., 23

dari satu istri atau seorang laki - laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang <sup>10</sup>.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang <sup>11</sup>.

Menurut Supriyanto (Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang) mendefinisikan poligami adalah perkawinan seorang laki - laki yang masih mempunyai istri yang sah. Dapat dikatakan poligami terjadi jika dalam waktu yang sama seorang laki - laki mempunyai istri lebih dari seorang. Poligami bukanlah pernikahan seorang laki - laki dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya jika pada saat pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya ternyata istri sebelumnya sudah meninggal atau sudah diceraikan <sup>12</sup>.

## **B. Dasar Hukum Isbat Nikah dan Poligami**

Jauh sebelum Undang - undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, isbat nikah sudah melembaga dalam himpunan penetapan dan putusan Pengadilan Agama tahun 50 - an terlihat bahwa salah satu jenis perkara

---

<sup>10</sup> Abdul Manan Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h., 129

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h., 351

<sup>12</sup> Supriyanto, (Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang), *Wawancara Tertulis*, tanggal 26 Nopember 2012

yang paling banyak adalah pengesahan nikah atau isbat nikah <sup>13</sup>. Adapaun dasar hukum dari isbat nikah atau penetapan nikah adalah :

1. Dalam Staatsblad

Dalam Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, untuk Jawa dan Madura. Serta Staatblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639 untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada pasal 4 ayat (1) untuk luar Jawa dan Madura <sup>14</sup>.

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1946

Pengesahan nikah atau isbat nikah diatur dalam pasal 3 ayat (5) undang - undang Nomor 22 tahun 1946 jls. "Disebutkan bahwa jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing - masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu <sup>15</sup> .

3. Dalam Undang - undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>13</sup> Al - Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h., 76

<sup>14</sup> Al - Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Loc, Cit.*, h., 76

<sup>15</sup> Lihat Undang - undang nomor 22 Tahun 1946.

Pasal 64 tersebut dikatakan "untuk perkawinan dan segalanya yang berhubungan dengan perkawinan yang berlaku sebelum undang - undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan - peraturan yang lama adalah sah" (yang dimaksud termasuk isbat nikah). Hal ini hanya terbatas dalam alasan adanya perkawinan yang terjadi sebelum undang - undang nomor 01 tahun 1974 berlaku, sedangkan isbat nikah dengan alasan lain tidak dimuat dan tidak ada penjelasannya tentang ketidak bolehan nya. Artinya adanya isbat nikah atau penetapan nikah hanya terbatas kepada satu alasan tersebut saja <sup>16</sup>.

#### 4. Undang - undang Peradilan Agama

Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan undang - undang Nomor 07 tahun 1989 yang sebagai mana telah diubah dengan undang - undang Nomor 03 tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan " Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal - hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang - undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain "Pernyataan tentang sah nya perkawinan yang terjadi sebelum undang - undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain" <sup>17</sup>.

#### 5. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 7 ayat 2 disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan kata nikah dapat diajukan isbat ke Pengadilan Agama dan dalam ayat 3

---

<sup>16</sup> Abdul Hamid Lubis, *Buletin Berkala Hukum Dan Peradilan*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2010), h., 4

<sup>17</sup> Pustaka Yustisia, *Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), h., 52



pasal tersebut lebih dijabarkan lagi yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal - hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
- b) Hilangnya Akte Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang - undang nomor 01 tahun 1974

<sup>18</sup>.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, disebutkan:

- a) Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) undang - undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka 22 penjelasan undang - undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 03 tahun 2006 dan berubah kedua dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.,4

- c) Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan undang - undnag Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 03 tahun 2006 dan berubah kedua dengan undang - undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya undang - undang Nomor 01 tahun 1974 , akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya undang - undang Nomor 01 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- d) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus selektif dan hati - hati dalam menagani permohonan isbat nikah. Kreteria selektif antara lain: Pemberlakuan DOM di Aceh dimana KUA tidak berfungsi dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mengetahui prosedur perkawinan <sup>19</sup>.

Sedangkan permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal - pasal 3, 4 dan 5 undang - undang nomor 01 tahun 1974, pasal 40

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2010), h., 147 - 148

sampai dengan 44 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam<sup>20</sup>.

1. Undang - Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak - fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang - undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk undang - undang ini, harus dipenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri - istri;

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h., 241

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan - keperluan hidup istri - istri dan anak - anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri - istri dan anak - anak mereka <sup>21</sup>.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
  - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak - anak, dengan memperlihatkan;

---

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996), h., 270-272

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau;
  - Surat keterangan pajak penghasilan, atau;
  - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri - istri dan anak - anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal - hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran - lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan Putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43<sup>22</sup>.

### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h., 336 - 338

#### Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya terbatas sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri - istri dan anak - anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat - syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang - undang nomor 01 tahun 1974 yaitu:
- a. Adanya persetujuan istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri - istri dan anak - anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri - istrinya sekurang - kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mampu memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan

dipesidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi<sup>23</sup>

### **C. Sebab - sebab Itsbat Nikah**

Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang - undang Nomor 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tida mempunya halangan perkawinan menurut undang – undang Nomor 01 tahun 1974<sup>24</sup>.

### **D. Ketentuan Pidana**

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah ini diatur tentang sangsi hukum denda bagi mempelai yang melanggar ketentuan - ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40, yaitu tentang pemberitahuan kehendak kawin kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendael Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), h., 171-173

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h., 205



dan dua orang saksi, dan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh izin. Adapun besarnya hukuman denda ialah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 10 ayat (3) sanksinya telah diatur juga dalam undang - undang nomor 22 tahun 1946 jo undang - undang nomor 32 tahun 1954 <sup>25</sup>.

Pasal itu juga mengatur sanksi hukuman denda sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan selama – lamanya tiga bulan bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13 dan 44. Jadi sanksi hukuman bagi mempelai yang melanggar pasal-pasal bersangkutan adalah berupa denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- sedangkan sanksi hukuman bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan - ketentuan pasal - pasal bersangkutan adalah berupa denda atau kurungan (hechtenis) yakni sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- atau selama - lamanya 3 (tiga) bulan kurungan <sup>26</sup>.

#### **E. Pedoman Khusus Izin Poligami di Pengadilan Agama**

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh undang - undang nomor 01 tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara izin poligami harus perpedoman kepada hal - hal sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h., 65

<sup>26</sup> *Ibid.*, h., 66

- (1) Permohonan izin harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
- (2) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang - undang nomor 01 tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat member izin poligami.
- (3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang - undang nomor 01 tahun 1974 bersifat komulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat member izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- (4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidak adilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini.
- (5) Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikata perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terkait perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.

Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

- (6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabot rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

- (7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami istri yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

- (8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.

- (9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri – istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak

mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, istri atau istri – istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

- (10) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima <sup>27</sup>.

## **F. Tata Cara Pemeriksaan Isbat Nikah dan Izin Poligami di Pengadilan Agama**

### **1. Tata cara pemeriksaan Isbat nikah**

Perkara pengesahan (isbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

#### **a. Tata cara penyelesaian perkara isbat nikah**

---

<sup>27</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2010), h., 139 - 141

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.).
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.).
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.).
4. Permohonan tersebut memuat:
  - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
  - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c. Alasan atau kepentingan yang jelas
  - d. Petitum (hal – hal yang dituntut berdasarkan posita)
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

b. Tahap pemeriksaan

1. Tahap persidangan

- Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan isbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg).

2. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan).

3. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.

c. Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT).

1. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan.

2. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir<sup>28</sup>.

## 2. Tata cara pemeriksaan permohonan izin poligami

Permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 undang – undang nomor 01 tahun 1974, pasal 40 – 44 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, pasal 55 – 59 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut :

### a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama

1. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) KHI)

### b. Kewenangan Relatif PA

2. Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 01 tahun 1974).

### c. Surat permohonan

3. Surat permohonan beristri lebih dari seorang harus memuat :
  - a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri/istri – istri.
  - b. Alasan – alasan untuk beristri lebih dari seorang

---

<sup>28</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Stabat, diambil pada tanggal 28 Januari 2013

c. Petitum.

4. Permohonan izin harus merupakan perkara contentious, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan.

d. Pemanggilan pihak – pihak

5. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan.
6. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan Yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal – pasal yang berkaitan.

e. Pemeriksaan

7. Pemeriksaan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran – lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/1975).
8. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan – alasan tertentu menurut pertimbangan Hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU. No. 4/1970).

f. Upaya damai

9. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, Hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR).



10. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.

g. Pembuktian

11. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidak alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat – syarat alternatif yaitu :
  - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau
  - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan didepan sidang
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak pemohon dengan memperlihatkan :
  - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
  - Surat keterangan pajak penghasilan atau
  - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

12. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

13. Persetujuan dari istri tidak lagi diperlukan dalam hal :

- Istri/ istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian atau
- Tidak ada kabar dari istrinya sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun atau
- Karena sebab – sebab lainnya yang perlu dapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

h. Putusan

14. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang

15. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

i. Biaya perkara

16. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU. No. 07/1989).

j. Pelaksanaan poligami

17. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, *Op.Cit.*, h., 241 - 243

**BAB IV**  
**ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**  
**NOMOR 15/PDT.G/2012/PA.SLP TENTANG**  
**ISBAT NIKAH POLIGAMI**

**A. Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Tentang Isbat Nikah Poligami  
Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan**

Menurut M. Yahya Harahap kekuasaan Kehakiman menganut asas motivating plicht atau basic reason. Artinya Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan - alasan yang dasar hukum serta pasal - pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya <sup>1</sup>.

Pasal 62 sama makna dan tujuannya dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi segala putusan pengadilan selain harus menurut alasan - alasan dan dasar - dasar putusan itu, juga memuat pula pasal - pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.,313

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau professional judgement <sup>2</sup>.

Bustanul Arifin mengatakan bahwa suatu putusan perkara perdata dapat dibagi dalam dua bagian yaitu pertimbangan hukum keputusan dan yang kedua amar putusan. Pertimbangan putusan dapat dibagi lagi pada dua bagian yaitu pertimbangan tentang fakta - fakta yang dikemukakan oleh para pihak atau yang biasa disebut dengan duduk perkara dan tentang hukum dari fakta - fakta tersebut atau juga dapat disebut bagaimana menurut pengadilan hukum yang akan ditetapkan dalam perkara itu <sup>3</sup>.

Bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam keputusan pengadilan pada hakekatnya adalah merupakan jalan pikiran Hakim dalam mengambil keputusan yang berujung pada amar - amar putusan itu. Hakim dalam sistem peradilan kita adalah Hakim yang bebas dalam memutuskan perkara, dia tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dia hanya bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri dan tentunya kepada Tuhan.

Sebenarnya Hakim dapat saja mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan - pertimbangan yang tertulis, dia bisa langsung mengucapkan amar putusan. Akan tetapi, karena Hakim dalam sistem kita adalah seorang Pejabat yang diangkat Negara, dia harus menerangkan proses pemikiran yang dijalaninya sehingga dia sampai kepada putusan itu. Inilah yang disebut pertimbangan, pertimbangan dalam suatu keputusan pengadilan. Putusan Hakim yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h., 314

<sup>3</sup> Khamimuddin, *Panduan Praktis Kiat Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2012), h., 65 - 66

diterima oleh masyarakat dan memenuhi unsur akademisi disertai alasan yang tepat <sup>4</sup>.

Putusan Hakim berdasarkan ijtihadnya senantiasa akan mendapat pahala disisi Allah Swt., sekalipun salah, asalkan dia memiliki otoritas serta ahli dibidangnya (seorang mujtahid). Ingat hadits nabi Muhammad Saw:

حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر      واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر

( )

Artinya: "Apabila Hakim memutuskan (perkara) kemudian dia berijtihad dan hasil ijtihadnya benar (tepat) maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah (tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala"( H.R. Muslim) <sup>5</sup>.

Salah satu produk hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama adalah Undang - undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang - undang perkawinan tersebut menganut asas monogami. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami Jadi adapun nikah yang boleh diisbatkan adalah nikah satu istri sesuai dengan asas monogami yang terkandung dalam Undang - undang nomor 01 tahun 1974.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h., 66

<sup>5</sup> Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h., 518

Sehingga sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengatur tentang pedoman khusus tentang cara beracara izin poligami di Pengadilan Agama agar tidak bertentangan dengan asas monogami yang terkandung dalam undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan salah satu produk undang - undang Peradilan Agama.

Menurut Aris Bintania, diantara produk peraturan dan perundang – undangan yang menjadi sumber hukum materil Pengadilan Agama adalah undang – undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 <sup>6</sup>.

Akan tetapi, berbagai produk peraturan dan perundang – undangan yang dijadikan landasan hukum materil Islam bagi Peradilan Agama ternyata dalam penegakannya masih menemui berbagai kendala dan persoalan, sehingga dalam penerapan banyak ditemui perlakuan dan penyikapan yang ambigu (mendua) baik dari instusi hukum maupun dari masyarakat <sup>7</sup>.

Didalam masyarakat terjadi berbagai ironi yang memperlihatkan, kasus – kasus semisal nikah sirri (nikah liar), nikah tanpa izin wali yang sah (wali palsu), dan tidak dihadapan pencatat nikah, poligami tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin pengadilan, termasuk yang paling marak talak diluar pengadilan (talak liar), perkawinan antara wanita muslim dan laki – laki non muslim atau sebaliknya yang bisa didaftarkan di catatan sipil,

---

<sup>6</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al – Qodha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h., 148

<sup>7</sup> *Ibid.*, h., 149

pembatalan perkawinan oleh lembaga selain pengadilan Agama, bahkan kawin kontrak (nikah mut'ah) <sup>8</sup>.

Setelah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Supriyanto selaku Hakim Ketua Majelis menyebutkan bahwa, tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang isbat nikah poligami dalam sebuah pasal khusus, tetapi sebaliknya juga tidak terdapat satu pasal pun yang melarang tentang isbat nikah poligami.

Oleh karena itu maka hal ini menjadi lading ijtihad para Hakim untuk mengadilinya jika ada perkara isbat nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hakim bebas memutuskan sesuai pertimbangan yang mendalam yang tentunya tidak terlepas dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan poligami dan isbat nikah <sup>9</sup>.

Artinya bagaimana putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp jika ditinjau menurut Undang – undang Perkawinan?. Penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami apabila ditinjau menurut undang – undang terutama undang – undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, penjelasan pasal 49 undang – undang peradilan Agama tentang kompetensi Pengadilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VI/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan kurang tepat, karena undang – undang tersebut melarang tentang adanya isbat nikah poligami.

Tetapi dari sudut pandang ijtihad putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami itu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h., 150

<sup>9</sup> Supriyanto, (Hakim Ketua Majelis), *Wawancara Tertulis*, pada tanggal 26 Nopember 2012, h., 6



benar. Karena selain Hakim sebagai Pejabat negara dan harus memutuskan perkara berdasarkan atauran – aturan negara atau undang – undang, impres, keputusan, atau surat edaran serta aturan – aturan yang lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang perlu diingat adalah bahwa disisi lain Hakim itu mempunyai hak paten untuk berijtihad yang dalam bahasa hukumnya disebut Juge made law.

Sebagaimana disebutkan didalam hadits nabi Saw.<sup>10</sup> :

حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر      واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر

( )

Artinya: "Apabila Hakim memutuskan (perkara) kemudian dia berjihad dan hasil ijtihadnya benar (tepat) maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berjihad dan hasil ijtihadnya salah (tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala (H.R. Muslim) " <sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h., 3 - 4

<sup>11</sup> Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Op.Cit.*, h., 518

**B. Dasar Hukum Atau Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Mengabulkan Isbat Nikah Poligami.**

1. Pokok – pokok pertimbangan dan dasar hukum Putusan nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp.

Apabila kita melihat dan membaca terhadap salinan putusan nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah (Poligami), adapun pokok - pokok pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berlawanan Termohon I dan Termohon II bermaksud untuk mendapat pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon I serta Termohon II adalah orang - orang yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) adalah perkara yang termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II bertempat kediaman di daerah hukum wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

sebagaimana bukti P.1, P2, dan pengakuan Termohon I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa dari posita dan tambahan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya Pemohon telah menikah secara Islam dengan Termohon I serta telah memenuhi syarat - syarat maupun rukun - rukun pernikahan, akan tetapi hingga saat ini belum mempunyai akta nikah karena memang pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan PPN KUA serta belum dicatatkan, dan saat ini Pemohon dan Termohon I sangat membutuhkan kutipan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka, oleh karenanya Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon I tersebut disahkan serta agar ditetapkan harta bersama dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon I maupun Termohon II telah membenarkan serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah tentang legalitas hukum perkawinan maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dalam persidangan guna mendapat kebenaran secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti - bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. dan P.9) yang masing-masing telah dimeterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka Majelis menilai bukti - bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 - 302 R.Bg dan Pasal 1889 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni 2 (dua) orang dari keluarga para pihak dan 2 (dua) orang lainnya dari orang lain (tetangga), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi - saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon sudah terikat perkawinan dengan Termohon II sejak tanggal 13 Juni 1973, dan oleh karena tidak ada bukti bahwa keduanya telah bercerai maka Majelis yakin hingga sekarang Pemohon dengan Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah tersebut, dan dengan demikian maka Majelis Hakim juga meyakini bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I adalah perkawinan poligami sehingga dalam pemeriksaan isbat nikah ini harus

diterapkan berbagai syarat dan ketentuan hukum sebagaimana dalam pemeriksaan izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Termohon II dalam persidangan terbukti Termohon II telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Termohon I, oleh karena itu maka Majelis menilai hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengakui dan membenarkan Pemohon menikah lagi dengan Termohon I adalah karena Termohon II sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon dengan baik secara biologis maupun fisik, Termohon II sering merasakan sakit ketika berhubungan suami-isteri dengan Pemohon, dan Termohon II sering pergi ke tempat anak beberapa hari untuk menghindari Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai hal ini telah sesuai dengan salah satu alasan mendasar diizinkan poligami bagi seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi terbukti Pemohon sanggup dan telah mampu berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak - anaknya, oleh karena itu maka Majelis menilai hal ini telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi terbukti Pemohon telah mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu maka Majelis menilai hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi terbukti pada tahun 1998 Termohon I berstatus janda cerai dan tidak sedang terikat perkawinan dengan seorang lelaki, oleh karena itu maka Majelis menilai Termohon I tidak dilarang untuk dinikahi oleh Pemohon karena tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon I tidak ada hubungan nasab, oleh karena itu maka Majelis menilai antara Pemohon dan Termohon I tidak ada halangan menikah karena nasab sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti obyek harta bersama Pemohon dengan Termohon I terletak di wilayah Kelurahan

Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pemeriksaan setempat Majelis Persidangan Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Maret 2012, terbukti Pemohon mempunyai sebuah rumah dengan ukuran 4m x 15m yang berdiri di atas tanah Pemohon dengan ukuran 6m x 35m terletak di Jl. Sempaya Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon sehingga obyek harta bersama yang berupa rumah tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon II, sedangkan tanah sebagai tempat berdirinya rumah harta bersama tersebut adalah tanah bawaan milik Pemohon yang telah dimilikinya sejak sebelum menikah dengan Termohon II maupun Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang telah menyaksikan proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon I lebih dari 10 tahun yang lalu dengan wali nikah ayah kandung Termohon I serta dengan 2 orang saksi, dan mahar berupa

seperangkat alat sholat, maka telah terbukti Pemohon telah menikah secara sah menurut syariat Islam dengan Termohon I pada tahun 1998 di Desa Sialang Pasung sebagaimana dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon memang tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, oleh karena itu Majelis menilai Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, ketiga, dan keempat dari Pemohon yang menerangkan bahwa setelah menikah dengan Termohon I, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon I dan Termohon II sekaligus dalam satu rumah di Selatpanjang dan hingga sekarang rumah tangga tetap berjalan rukun-rukun selalu serta tidak pernah terdengar kabar adanya perselisihan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon I maupun Termohon II, maka Majelis menilai terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah berjalan dengan harmonis sejak tahun 1998 hingga sekarang, serta Pemohon



dapat dianggap telah mampu berbuat adil serta mampu memenuhi kebutuhan hidup terhadap isteri - isteri dan anak - anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi maka Majelis menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon I belum mempunyai kutipan akta nikah serta keduanya juga belum pernah bercerai, dan saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah guna pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini kedua anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran lantaran kedua orang tuanya yakni Pemohon dan Termohon I hingga saat ini belum mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan keduanya, oleh karena itu Majelis menilai alasan Pemohon dalam mengajukan isbat nikah ini cukup kuat;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta tidak bertentangan dengan akal sehat, oleh karena itu Majelis

menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg<sup>12</sup>.

2. Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami.

Sedangkan hasil wawancara tertulis penulis yang dilakukan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 di Pengadilan Agama Selat Panjang bersama dengan Supriyanto (Hakim Ketua Majelis), Ia mengatakan bahwa dasar hukum atau pertimbangan yang dijadikan oleh Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan isbat nikah atau penetapan nikah poligami terhadap perkara atau putusan nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp dapat dilihat dari 3 (tiga) alasan atau pertimbangan yaitu sebagai berikut :

**Pertama** secara Yuridis atau undang - undang dapat dilihat berdasarkan pasal 49 huruf a angka 1 undang - undang nomor 03 tahun 2006, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 hurug (a) Undang - undang nomor 03 tahun 2006 tentang perubahan atas undang - undang nomor 07 tahun1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadila Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3, 4, 5 dan 65 jo. Pasal 39,40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp

Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan poligami dalam Pasal 3, 4, 5 dan 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tentang alasan - alasan dan syarat - syarat poligami pemohon telah memenuhi ketentuan untuk berpoligami, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut dapat diisbatkan.

Dengan berdasarkan pasal - pasal yang membolehkan poligami dan isbat nikah tersebut, maka secara yuridis jika perkawinan poligami dilakukan secara sirri dan memenuhi segala syarat poigami serta memenuhi segala syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan - larangan perkawinan maka jelas hal itu layak untuk diisbatkan.

Disamping itu setiap orang pasti ingin diperlakukan secara hukum yang berlaku pada umumnya, sedangkan orang yang menikah secara sirri ada beberapa haknya yang tidak dilindungi oleh hukum seperti tentang waris, perwalian, nafkah, harta gono - gini, akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka isbat nikah merupakan usaha untuk membantu seseorang agar dapat perlindungan hukum secara layak, tidak terkecuali termasuk juga isbat untuk pernikahan sirri poligami. Sementara kami memandang sesungguhnya ijin poligami kepengadilan tidak lain adalah untuk lebih menjamin perkawinan agar tetap dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yangn Maha Esa atau dalam bahasa agama untuk mencapai sakinah, mawadah dan rohmah <sup>13</sup>.

**Kedua** secara sosiologis setiap orang pasti menginginkan hidup bersosial secara wajar dan seutuhnya , demikian juga orang yang menikah secara sirri juga pasti ingin diperlakukan secara sosial sebagaimana mestinya. Untuk menghindari adanya perlakuan sosial di masyarakat yang kurang anak terhadap orang yang melakukan pernikahan secara sirri, misalnya anggapan kumpul kebo, nikah murahan, anak tidak punya bapak dan berbagai anggapan miring lainnya dari kelompok masyarakat tertentu maka isbat nikah merupakan solusi agar seseorang yang melakukan nikah sirri mendapatkan perlindungan secara sosial di masyarakat, hal ini tidak terkecuali termasuk juga isbat nikah untuk pernikahan sirri poligami <sup>14</sup>.

**Ketiga** secara filosofis tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa agama untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah. Sementara orang yang melakukan pernikahan pernikahan secara sirri hamper dapat dipastikan banyak hak - haknya yang tidak dilindungi secara hukum bahkan sangat mungkin mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya dikelompok masyarakat tertentu, oleh karena itu maka orang yang melakukan pernikahan secara sirri akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas termasuk nikah sirri poligami.

---

<sup>13</sup> Supriyanto, (Hakim Ketua Majelis), *Wawancara Tertulis*, pada tanggal 26 Nopember 2012, h., 4 - 5

<sup>14</sup> *Ibid.*, h., 5

Tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas merupakan hak dari setiap orang yang menikah termasuk yang menikah secara sirri ataupun sirri poligamin, bahkan bisa dikatakan merupakan hak hasasi setiap kehidupan manusia. Usaha atau tindakan untuk membantu seseorang meraih tujuan perkawinan tersebut merupakan kebajikan. Oleh karena itu membantu seseorang yang telah menikah secara sirri poligami dengan syarat telah memenuhi syarat - syarat dan aturan-aturan tentang pernikahan dan poligami serta tidak melanggar berbagai larangan tentang perkawinan, maka hal itu termasuk kebajikan pula.

Pada intinya isbat nikah poligami yang dikabulkan adalah untuk menghindarkan dari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis <sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h., 6

**C. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami.**

Sub - sub analisa dalam penelitian ini berisi uraian analisa terhadap dasar hukum atau pertimbangan Majelis Hakim dan bagaimana putusan ini ditinjau menurut Undang - undang Peradilan Agama. Apabila kita melihat produk hukum materil yang digunakan di Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah tidak ada satu pasal pun undang - undang, Instruksi Presiden (inpres), peraturan Mahkamah Agung maupun Yurisprudensi yang mengatur tentang isbat nikah poligami.

Sehingga disinilah ladang ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang dalam memutuskan perkar nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami, mereka mengambil pasal - pasal yang berhubungan dengan isbat nikah dan poligami. Sehingga Majelis Hakim bersepakat bahwa isbat nikah merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan syarat - syarat poligami sudah terpenuhi, maka disinilah Majelis Hakim berani mengabulkan isbat nikah poligami. Tetapi pada intinya, itu semua tidak terlepas dari pada ijtihad Majelis Hakim yang mengutamakan atau mengedepankan kemaslahatan dan menolak kemudorotan.

Membahas tentang kemaslahatan, Masalahah ( **مصلحه** ) berasal dari kata shalahah ( ) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti

kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata ( ), yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan <sup>16</sup>.

Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti, perbuatan - perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan <sup>17</sup>.

Para ulama usul memberikan takrif al – mashalahah mursalah dengan memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan <sup>18</sup>.

Pada dasarnya mayoritas ahli usul fiqh menerima metode masalah mursalah. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut :

1. Masalah tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan *relevan (munasib)* dengan kasus hukum yang ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid Dua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h., 345

<sup>17</sup> *Ibid.*, h., 346

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h., 86

2. Masalah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul al – haraj*), dengan cara menghilangkan *massaqqat* dan *madharrat*.
3. Masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al – syari'at*), dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i* <sup>19</sup>.

Sementara itu Al – Gazali menetapkan beberapa syarat agar masalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah sampai mengancam eksistensi lima unsure pokok *maslahat* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar – benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan sebagai dugaan (*zhan*) semata – mata.
3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku umum dan kolektif, tidak bersifat individual <sup>20</sup>. Apabila maslahat itu bersifat individual, kata Al – Gazali, maka syarat lain yang harus

---

142 <sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.,

259 <sup>20</sup> Al -Gazali, *Al- Musthafa min 'Ilmi Al -Ushul*, (Kairo: Sayyid Al-Husei, tt), h., 253 -



dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqashid al – syari’at*

<sup>21</sup>.

Kemudian At –Tufi yang tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Bagi At – Tufi, versi akal lebih objektif dalam memposisikan kriteria masalah ketimbang antagonism nas (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya.

Karenanya, validitas kehujjahan masalah harus diprioritaskan atas dalil – dalil yang lain, termasuk nas sar’iy. Ini sungguh merupakan tawaran sebuah teori yang secara diametral berseberangan dengan teori masalah dalam fiqh konvensional. Sekurang – kurangnya ada empat landasan ideal yang dijadikan pijakan oleh At – Tufi dalam menelaah dan meletakkan dasar – dasar teori masalah dalam fiqh Islam yaitu :

1. Independensi rasio dalam upaya menemukan masalah. Menurut At – Tufi akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu masalah dan apa itu mafsadat.
2. Masalah merupakan dalil syar’iy yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan masalah tidak memiliki ketergantungan dengan nas.
3. Objek penggunaan teori masalah adalah hukum – hukum transaksi sosial (muamalah) dan hukum – hukum kebiasaan (‘adah).

---

<sup>21</sup> Faturrahman Djamil, *Loc.Cit.*, h., 142

4. Masalah merupakan dalil syar'iy urutan teratas, sehingga pengutamaannya atas nas (teks ajaran) dan ijma (consensus para mujtahid) merupakan keniscayaan <sup>22</sup>.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan - kebiasaan manusia <sup>23</sup>, termasuk juga disini isbat nikah poligami.

Sehingga kemaslahatan yang diambil oleh Majelis Hakim benar - benar sudah pada aturan - aturan yang tepat untuk mencegah kemafsadatan (kerusakan). Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan:

- 1.

*Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan".*

- 2.

*Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan".*

- 3.

*Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat" <sup>24</sup>.*

- 4.

---

<sup>22</sup> Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h., 118 - 121

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqih Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h., 29

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 11

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat, didahulukan menolak yang mafsadat" <sup>25</sup>.*

Adapun untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan disini yang dapat penulis tarik atau ambil adalah :

1. Bagaimana pelaku nikah sirri yang diisbatkan disini bisa diperlakukan sama didepan hukum, sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa agama disebut sakinah, mawadah dan rohmah dapat tercapai dan terpenuhi.
2. Agar pelaku nikah sirri dapat mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum dari negara maupun masyarakat sehingga dipandang sama didepan hukum dan diperlakukan sama dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Sehingga isu - isu atau anggapan kumpul kebo, nikah murahan, anak tidak punya bapak , istri simpanan, wanita matrai, wanita murahan dan berbagai anggapan miring lain tidak ada yang muncul dari masyarakat.
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri secara hukum statusnya tidak mempunyai ayah, hubungan keperdataannya hanya dari jalur ibu kandungnya ke atas. Sehingga ketika ingin menikah baru mengetahui, mungkin - mungkin bisa membuat anak tersebut sedih, sock bahkan stress.

---

<sup>25</sup> Abdul Mudjib, *Kaedah - kaedah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h., 39

4. Jika anak dari perkawinan sirri tersebut perempuan maka yang berhak menikahkannya hanyalah wali hakim, pihak keluarga tidak ada yang berhak menjadi walinya.
5. Pada masyarakat tertentu rumah tangga yang dibangun atas pernikahan sirri akan dipandang sebelah mata.
6. Status keluarga yang dibangun atas pernikahan sirri secara hukum tidak akan bisa mendapatkan kartu keluarga dengan kepala keluarga suami, akte kelahiran, susah pengurusan paspor maupun keterangan pensiunan janda ketika suami meninggal.
7. Bagi suami istri bisa dianggap bukan istri dan secara hukum tidak bisa menuntut nafkah, bahkan ketika suami meninggal dunia istri tidak bisa menuntut warisan ataupun harta gono gini.
8. Dan masih sangat banyak kemungkinan muncul berbagai resiko lainnya yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai sanksi atau karma atas adanya pernikahan sirri.

Demikianlah hasil pembahasan tentang analisa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.S lp tentang isbat nikah poligami semoga bermanfaat buat penulis dan umumnya para pembaca.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari Skripsi yang berjudul Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang Isbat Nikah poligami adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami apabila ditinjau menurut undang – undang terutama undang – undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, penjelasan pasal 49 undang – undang peradilan Agama tentang kompetensi Pengadilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VI/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan kurang tepat, karena undang – undang tersebut melarang tentang adanya isbat nikah poligami.
2. Dasar hukum atau pertimbangan yang dijadikan oleh Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang mengabulkan isbat nikah poligami adalah bahwa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama ada tiga yaitu, secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Sub- sub analisa putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G2012/PA.Slp tentang Isbat Nikah poligami yaitu pada intinya isbat nikah poligami yang dikabulkan adalah untuk menghindarkan dari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan. Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan:

*Artinya: " Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat ".*

## **B. Kritik dan Saran**

Adapun kritik dan saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kedepan adalah :

1. Kepada para pembaca skripsi yang berjudul Analisa Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami ditinjau menurut undang - unang Perkawinan, apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun analisis yang penulis lakukan, demi perbaikan agar bisa member masukan melalui hanpone 085265572655 atau email rie\_khay@yahoo.com.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum yang ada di Indonesia, agar bisa memperjelas dan mengatur secara pasti dan tegas tentang isbat poligami, sehingga ada kepastian hukum dan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda diantara para wakil tuhan dibumi (Hakim).
3. Kepada para penegak hukum khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman agar bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku nikah sirri. Karena dengan tidak adanya saksi yang tegas, semakin marak dan meraja lela pernikahan sirri.
4. Kepada seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia, marilah kita bersama - sama mengikuti dan melaksanakan aturan - aturan yang ada sehingga kita dapat perlindungan hukum, dipermudah dalam segala urusan, dipandang sama dihadapan hukum dan tidak merasa dipandang sebelah mata

atau dikucilkan oleh masyarakat. Salah satu contoh masalah pernikahan maupun izin poligami yang sudah penulis paparkan dengan sekuat tenaga tentang akibat - akibatnya yang mungkin bisa diambil hikmahnya.

5. Khusus bagi kaum wanita, hati - hati dalam memilih pasangan hidup dan jangan mau diajak untuk melakukan nikah sirri karena, yakinlah dan percaya, bahwa nikah sirri banyak merugikan kaum wanita dan anak - anak yang dilahirkan dari nikah sirri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- , *Kaidah - Kaidah Fiqih Kaidah Hukm Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Abdul Hamid Lubis, *Buletin Berkala Hukum Dan Peradilan*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2010).
- Abdul Manan Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Abdul Mudjib, *Kaedah - kaedah Ilmu Fiqih (Al - Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al - Munawir*, (Surabaya: Progresif, 1984).
- Al - Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.31 Tahun. VIII 1997*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997).
- Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H).
- Al -Gazali, *Al- Musthafa min 'Ilmi Al -Ushul*, (Kairo: Sayyid Al-Husei, tt).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, ( Jakarta : Siraja, 2006), Cet. II.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet : II; Jakarta : Kencana, 2007).
- , *Usul Fiqh Jilid Dua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al – Qodha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).



Arso Sosroatmodjo, SH dan A. Wasit Aulawi, MA., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Edi Riadi, (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta), *Kumpulan Makalah yang disampaikan dalam acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama se wilayah PTA Pekanbaru*, (Jakarta: PTA Jakarta, 2010).

F .Agsa, *Undang - undang Peradilan Agama Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI No.7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Amasa Mandiri, 2010).

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Peyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011).

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang - undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, ( Terbitan Jambatan, 1985).

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Alih , *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abdul Muthallib (Jakarta: pustaka Azzam, 2007).

Jonanthan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).

Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendeal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994).

-----, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010).

-----, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendeal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996).

-----, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001).

-----, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2010).

-----, *Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1992).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1972).

Mohammd Rif'ai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978).

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Nilla Fitria, *Skripsi Penyelesaian Perceraian Nikah Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: IAIN SUSQO Pekanbaru, 2003).

Pustaka Yustisia, *Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009).

Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Wahbah al - Zuhaily, *Al-Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dara al-Fikr, tt), Juz VII.

Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Khoiri, S.Sy dilahirkan disebuah desa yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tempatnya didesa Tanjung Katung (Desa Tanjung Darul Ta'zim sekarang) pada tanggal 17 Juli 1989 dari Ayah Darmuji dan Ibu Napsiah. Riwayat pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 092 Tanjung Katung tamat tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Selat Panjang tamat tahun 2006 dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selat Panjang tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Akhwal Al - Syakhsyiah (Peradilan Agama Dan Hukum Keluarga) selesai pada tanggal 08 April tahun 2013.

Riwayat pendidikan non formal adalah Madrasah Diniya Awaliyah (MDA) atau (Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau DTA sekarang) Al - Khoiriyah Tanjung Katung, Madrasah Diniyah Wustho (MDW) atau (Diniyah Takmiliyah Wustha atau DTW sekarang) Pon - Pes Bahrul 'Ulum dan Dan Madrasah Diniyah Ulya (DTU) atau (Diniyah Takmiliyah Ulya atau DTU sekarang) Pon - Pes Bahrul 'Ulum.

Motto hidup adalah bagaimana biar hidup yang sekali ini bisa berarti dan bermakna dengan kita banyak - banyak berbuat kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Email [rie\\_khay@yahoo.com](mailto:rie_khay@yahoo.com) dan Hanpone 085265572655.